

KEMITRASEJAJARAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS WANITA

Oleh :
Sri Pujiastuti

Abstrak

Besarnya jumlah wanita menyadarkan kita akan sayangnya bila pemerintah tidak melibatkan mereka dalam pembangunan. Namun pada umumnya kemampuan wanita masih kurang dibandingkan dengan pria, oleh karena itu perlu upaya memampukan wanita agar dapat menjadi mitra sejajar dengan pria, dan menjadi potensi besar yang menguntungkan dalam pembangunan. Upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. peningkatan kualitas wanita; 2. penciptaan lingkungan yang kondusif; dan 3. penanggulangan kendala.

Pemampuan wanita akan dapat meningkatkan berbagai peranannya dalam kehidupan untuk mencapai kemitrasejajaran dengan pria. Ini berarti bila masyarakat telah menerima konsep kemitrasejajaran atau sadar jender, maka hal ini akan dapat lebih memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk berkarya, sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini kemitrasejajaran antara pria dan wanita sering muncul dalam pembicaraan tentang wanita. Persoalan kesetaraan jender sebenarnya sudah tercantum dalam GBHN 1993 dan Pelita VI. Di situ dicantumkan bahwa wanita sebagai sumber daya manusia potensial dalam pembangunan dan mitra sejajar kaum pria, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Namun pada kenyataannya tidak seluruhnya hal itu dapat berjalan dengan mulus. Masih banyak diskriminasi terselubung atau ketidaksetaraan jender, baik di sektor domestik maupun publik. Hal itu menyebabkan kemampuan wanita pada umumnya masih kurang dibandingkan dengan pria, sehingga dengan sendirinya produktivitas wanita pada umumnya masih di bawah pria. Sebagai contoh kekurangmampuan wanita dibanding pria tampak dari tingkat pendidikan, kesehatan, kualitas dan kuantitas partisipasi sebagai pelaku pembangunan, partisipasi di badan legislatif dan eksekutif, dalam bidang usaha, media massa, dan sebagainya (United Nations, 1995).

Sehubungan dengan hal itu perlu usaha pemampuan wanita untuk mencapai kemitrasejajaran dengan pria. Jika kemampuan wanita meningkat, ini berarti akan meningkatkan produktivitasnya.

Dalam rangka membantu pemerintah melaksanakan program untuk mencapai kemitrasejajaran dengan pria, Pusat Studi Wanita (PSW) IKIP Yogyakarta bersama PSW dari universitas dan institut yang ada di

Yogyakarta ini telah menjadi tim pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) di DIY.

Kemitrasejajaran

Istilah jender tidak dapat dilepaskan dari kemitrasejajaran. Apakah jender itu? Jender adalah perbedaan-perbedaan sifat wanita dan pria yang tidak mengacu pada perbedaan biologis, tetapi pada nilai-nilai sosial budaya yang menentukan peranan wanita dan pria dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Jadi masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam menentukan peranan wanita dan pria.

Istilah jender berbeda dengan seks. Perbedaan antara jender dan seks adalah bahwa istilah seks digunakan untuk mengacu pada fenomena biologis, sedangkan jender menunjuk pada atribut sosial. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa pembeda antara pria dan wanita hanyalah pada fungsi reproduksi saja.

Menurut Sugiah (1995: 1-2) pembangunan di bidang wanita dewasa ini menggunakan konsep GAD (Gender and Development/jender dan pembangunan), yaitu pembangunan yang berwawasan jender. Konsep ini menitikberatkan pada usaha pemampuan wanita dalam hubungannya dengan pria, wanita bukan satu-satunya sasaran pembangunan. Sehubungan dengan itu perlu adanya pengenalan atau pemasyarakatan jender sehingga masyarakat menjadi sadar jender.

Menurut Menteri UPW, arti kesadaran jender dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Wanita adalah sebagai wakil dari setengah jumlah penduduk.
2. Pembangunan melibatkan pria dan wanita sesuai potensinya.
3. Tidak hanya kesehatan, gizi, dan kesehatan anak, tetapi juga meliputi kawasan pendidikan, industri/produksi, sosial budaya, dan lain-lain secara proporsional.
4. Peningkatan dan pengembangan pengalaman, kesadaran diri, serta kreativitas wanita dan pria.
5. Wanita dan pria diikutsertakan sebagai peserta dan pengambil keputusan.

Setelah jender, sekarang giliran istilah kemitrasejajaran yang akan dibahas. Menurut Menteri UPW (1995: 18) kemitrasejajaran yang harmonis, selaras, serasi, dan seimbang adalah kondisi dinamis:

Pria dan wanita, yang memiliki persamaan hak dan kewajiban, kedudukan, kemampuan, peranan dan kesempatan sehingga keduanya dapat bekerja sama sebagai mitra seajar untuk berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai subyek atau pelaku dalam penentuan kebijaksanaan dan pengambil keputusan, perencanaan dan pelaksanaan.

maupun sebagai obyek atau sasaran pembangunan yang memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Dalam kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemitrasejajaran yang harmonis tadi diwujudkan dalam sikap dan perilaku saling peduli, menghormati dan menghargai, saling membantu dan mengisi, dilandasi rasa saling asah, asih dan asuh.

Agar dapat menjadi mitra sejajar pria seperti tersebut di atas perlu upaya peningkatan kemampuan wanita agar setingkat dengan pria. Melihat kondisi dan situasi wanita Indonesia dewasa ini, kiranya sangat diperlukan usaha pemampuan wanita untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan sehingga dapat menjadi mitra sejajar dengan kemampuan pria. Hal ini tampak dalam arahan GBHN 1993 tentang PJPT II dan PELITA VI, pemampuan wanita diarahkan untuk memampukan wanita agar dapat lebih berperan serta dalam pembangunan, serta dapat sebagai mitra sejajar pria yang selaras, serasi, dan seimbang, baik sebagai pelaku, penikmat, maupun sebagai pemerata hasil-hasil pembangunan, dalam semua bidang dan sektor, di semua tingkat kegiatan, termasuk dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu pemampuan wanita untuk dapat meningkatkan peran gandanya dalam keluarga dan masyarakat harus dilengkapi dengan peningkatan peran ganda pria dalam keluarga secara berangsur-angsur. Peran ganda pria ini antara lain meliputi peningkatan tanggung jawab dan peran dalam pekerjaan rumah tangga, dalam penjagaan/pembinaan sumber daya manusia, (anak, orang tua yang sakit, dan lain-lain), serta tanggung jawab keluarga lainnya yang berupa kegiatan agama, budaya, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Jika masyarakat telah sadar jender dan menerima konsep kemitrasejajaran, ini berarti akan dapat lebih meningkatkan produktivitas wanita.

Menurut Menteri UPW, menerima wanita sebagai mitra sejajar pria dan peran gandanya mengandung pengertian bahwa wanita harus dilihat secara utuh dalam berbagai kedudukan dan peranannya, yaitu wanita sebagai: diri pribadi, sumber insani bagi pembangunan, warga negara, isteri, ibu pendidik anak, pengelola rumah tangga atau kepala rumah tangga, dan penerus generasi.

Sebagai diri pribadi, wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam perencanaan, pelaksanaan, penikmat, dan pemerata pembangunan. Sebagai warga negara wanita mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan dengan pria, misalnya dalam berpolitik, bernegara dan mempertahankan negara. Kemudian sebagai isteri, wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam menciptakan keluarga yang bahagia sejatara. Sebagai pendidik anak, wanita dan pria sebagai ibu dan bapak dari anak-anak, baik akhlak maupun ilmu pengetahuannya.

Selanjutnya sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, bersama-sama dengan suaminya sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan jasmani maupun rohani, seperti: jasa, barang, maupun mental spiritual. Sebagai penerus generasi, wanita mengemban kodrat haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Kodrat wanita ini perlu diakui, dihargai, dan dilindungi oleh anggota keluarga dan masyarakat, baik tua, muda, pria maupun sesama wanita, untuk bertanggung jawab bersama-sama dalam meneruskan generasi demi kelangsungan hidup manusia.

Berbagai Peran Wanita

Peran atau role adalah perilaku seseorang yang sudah terpola. Peran menyangkut hak dan kewajiban tertentu. Peran berhubungan dengan status pada kelompok tertentu dan dengan situasi sosial yang khas. Peran seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan pendapat, dan sosial ekonominya dalam masyarakat.

Seringkali peran seseorang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain dan oleh citra yang ingin dikembangkan oleh individu itu sendiri. Oleh karena itu peran merupakan keseluruhan pola budaya yang berkaitan dengan status tertentu.

Peran jender berarti peran wanita/pria dikaitkan dengan status, lingkungan, dan budayanya. Pada umumnya orang tidak menyadari bahwa dirinya memiliki beberapa peran sekaligus. Untuk mempermudah pengkajian terhadap peran wanita, maka kita dapat melihatnya melalui 3 peran pokok, yaitu: produktif, reproduktif, dan sosial. Peran produktif adalah peran yang menyangkut kegiatan yang langsung menyumbang pendapatan keluarga tanpa melihat apakah kegiatan tersebut menghasilkan uang atau tidak, misalnya: bertani, beternak, berdagang, dan sebagainya.

Peran reproduktif adalah peran yang menyangkut kelangsungan hidup manusia/keluarga, misalnya: melahirkan, mengasuh anak, mengambil air ke sendang, memasak, mencuci, dan lain-lain.

Peran sosial mencakup kegiatan yang tidak terbatas pada pengatur-an keluarga saja, tetapi juga pada komunitasnya, misalnya peran dalam: PKK, Koperasi, Kelompok Tani, dan sebagainya. Kenyataannya, peran ganda wanita (di dalam dan di luar rumah) menimbulkan kompleksitas fungsi, tugas dan kewajiban wanita, yang menuntut kemampuan memprediksi dan mengalokasikan potensi yang tepat, yaitu **KAPAN, DI MANA, dan BAGAIMANA** tugas sebagai isteri, ibu, menejer rumah tangga, anggota masyarakat, dan pekerja (pencari nafkah) harus diperankan. Peningkatan peran wanita dalam ketiga peran di atas akan dapat menjadikan wanita sebagai mitra seajar pria, dan meningkatkan produktivitasnya.

Satu indikator yang memungkinkan seseorang untuk memerankan perannya secara profesional adalah pendidikan. Dewasa ini secara berangsur-angsur tingkat pendidikan wanita menunjukkan peningkatan yang pesat, namun secara umum kondisinya tetap masih tertinggal dibanding pria. Meningkatkan pesatnya pendidikan wanita akan menyebabkan meningkatnya peluang mereka berkarya, berkarir, dan berbisnis di tahun 2000-an (abad XXI mendatang). Ini berarti peran wanita di abad ini tidak lagi terbatas dalam lingkup keluarga. Pergeseran ke arah stereotipe model peran wanita ini menjadi nyata.

Vitayala (1995: 11-12) mengatakan bahwa:

Prospek dan pengembangan peran citra wanita dalam keluarga abad XXI akan mengambil bentuk sebagai: (1) menejer rumah tangga (menjadi isteri, ibu, dan ibu rumah tangga); (2) pekerja dan menejer rumah tangga, dan (3) pekerja profesional. Jika dilihat dari data penduduk wanita dewasa (angkatan kerja), kombinasi kategori (2) dan (3) dibanding kategori (1) akan berbanding 1 : 1.

Dari segi peran, selanjutnya Vitayala memisahkan peran wanita menjadi lima, yakni:

- (1) **Peran Tradisi**, yaitu peran yang menempatkan wanita dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak), hidup seluruhnya untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu wanita di rumah, pria di luar rumah.
- (2) **Peran Transisi**, yaitu wanita berperan ganda, namun keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab wanita.
- (3) **Dwiperan**, yaitu peran yang memposisikan wanita dalam kehidupan dunia kerja. Peran domestik-publik sama-sama penting. Dukungan moral suami dapat merupakan pemacu ketegaran atau keresahan.
- (4) **Peran Egalitarian**, yaitu peran yang menyita waktu dan perhatian wanita di luar rumah. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki/suami sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan.
- (5) **Peran Kontemporer**, yaitu peran yang dipilih wanita untuk mandiri dalam kesendirian (sendiri tidak kawin).

Pemilihan peran yang dilaksanakan wanita sangat bergantung pada kondisinya, hal ini berguna untuk menyusun dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan di bidang kewanitaan, misalnya saja kapan waktunya suatu instansi dapat melaksanakan proyeknya: pagi, siang atau malam hari.

Pemampuan Wanita

Pemampuan wanita adalah usaha yang dilakukan untuk memampukan wanita dalam segala bidang. Hal ini karena kemampuan wanita selama ini masih dipandang kurang dibanding dengan pria.

Sehubungan dengan hal itu, telah keluar INPRES No. 5 tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah. Instruksi tersebut ditujukan kepada:

1. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
4. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kemampuan wanita agar dapat menjamin pelaksanaan upaya memampukan wanita yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kaum wanita. Program peningkatan wanita dalam Repelita VI dalam usahanya memampukan wanita sekaligus meningkatkan produktivitasnya, didasarkan pada hasil-hasil konperensi dunia tentang wanita, dan disesuaikan dengan kondisi dan falsafah negara kita. Menurut Sjamsiah Achmad (1995: 11-13) dan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita (1993), upaya tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu: peningkatan kualitas wanita, penciptaan lingkungan yang menunjang, dan penanggulangan kendala.

1. Peningkatan Kualitas Wanita

Upaya ini bertujuan agar wanita sebagai insan harus dapat tumbuh berkembang secara optimal dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya ini meliputi pemenuhan kehidupan dasar akan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar, keterampilan dan kejuruan, manajemen dan kepemimpinan, IPTEK, perwujudan dan perlindungan hak azasi dan kemerdekaan dasar, dan sebagainya.

Pembinaan kemitrasejajaran dengan pria yang selaras, serasi, dan seimbang antara pria dan wanita, dalam keluarga dan masyarakat, dilandasi sikap perilaku saling menghormati, menghargai, saling mengisi dan membantu, dengan memperhatikan kodrat dan harkat masing-masing. Apabila hal ini dapat terealisasi dalam kehidupan nyata, yakni kemitrasejajaran yang harmonis, maka keadaan ini akan dapat meningkatkan produktivitas kaum wanita.

2. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif

Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat memampukan wanita sebagai mitra sejajar pria. Usaha ini meliputi nilai-nilai sosial budaya yang tercermin dari perilaku masyarakat, kerangka hukum dan peraturan perundangan, kedudukan ekonomi dalam keluarga dan masyarakat, peranan dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai peraturan dan prosedur tata hidup

bermasyarakat, tata kerja dan berusaha, keluarga berencana, TPA (Tempat Penitipan Anak), pelembagaan mekanisme pemampuan wanita agar dapat menjadi mitra seajar pria.

Dalam hal Keluarga Berencana, hasil yang telah tampak adalah meningkatnya usia perkawinan pertama dan mengecilnya jumlah anak dalam setiap keluarga. Hal ini memungkinkan wanita lebih berkesempatan meningkatkan kualitas hidupnya, kesehatan, dan ekonomi karena dapat membantu suami mencari uang. Ini berarti pula meningkatkan produktivitas kaum wanita.

Mengenai pelembagaan upaya pemampuan wanita, lembaga yang menanganinya adalah Kantor Menteri UPW, Tim Pengelola P2W dan PSW di daerah, Biro Perencanaan Departemen dan Lembaga non-Departemen, Organisasi Wanita, PKK, serta organisasi profesi dan keahlian, dan sebagainya.

3. Penanggulangan Kendala

Upaya ini digunakan untuk mengatasi semua kendala, yakni untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan semua kendala persamaan jender dan pemampuan wanita serta anak. Kegiatan ini antara lain meliputi empat kegiatan:

- a. Kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran serta pemasyarakatan "Jender dan Pembangunan", serta "Analisis Jender", untuk mengubah persepsi pria dan wanita, tua dan muda tentang hubungan pria dan wanita dalam arti mengubah sikap mental dan perilaku mereka agar dapat mengubah "hubungan jender dan stereotipe" menjadi "hubungan jender yang selaras, serasi, dan seimbang".
- b. Kegiatan yang mendorong yang memelopori penyempurnaan hukum dan perundang-undangan yang ada atau menciptakan yang baru yang sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Wanita, sekaligus segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita.
- c. Kegiatan yang mendorong pengintegrasian konsep kemitrasejajaran pria dan wanita yang selaras, serasi, dan seimbang ke dalam sistem pendidikan nasional yang meliputi antara lain: kurikulum, buku-buku teks, pendidikan guru dan sebagainya. Selain itu juga permasalahan tentang akses atau peluang wanita terhadap semua jenis dan jenjang pendidikan, terutama jenjang pendidikan dasar, keterampilan, IPTEK, manajemen, dan kepemimpinan.
- d. Kegiatan yang mendorong dikembangkannya kemampuan para perencana pembangunan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berwa-wasan jender.

Berbagai program upaya pemampuan wanita di atas bertujuan meningkatkan kemampuan wanita dalam berbagai bidang, sehingga dapat menjadi mitra sejajar pria, dan sekaligus meningkatkan produktivitas kaum wanita. Oleh karena jumlahnya yang besar maka wanita akan menjadi potensi yang besar pula dalam melaksanakan pembangunan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai mitra sejajar pria, perlu upaya pemampuan wanita. Upaya meningkatkan kemampuan wanita dapat dikelompokkan menjadi tiga: 1. Upaya meningkatkan kualitas wanita; 2. Upaya menciptakan lingkungan yang kondusif; dan 3. Upaya mengatasi kendala yang meliputi penghapusan diskriminasi terhadap wanita, dan kendala pencapaian kemitrasejajaran wanita dengan pria. Upaya ini dapat meningkatkan produktivitas dan peranan kaum wanita. Ini berarti kemitrasejajaran dapat meningkatkan produktivitas kaum wanita.

Upaya ini perlu partisipasi dari kaum pria agar mau memberi peluang bagi wanita sebagai mitra seajarnya, sehingga tercapai kondisi kemitrasejajaran yang selaras, serasi, dan seimbang.

Daftar Pustaka

- Aida Vitayala Sjafrî Hubeis, 1995, **State of The Art Studi Jender dan Pembangunan**, Makalah disampaikan dalam Seminar dan Pelatihan Studi Jender di IPB, Bogor.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi DIY, 1996, **Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan pada Repelita VI di Propinsi DIY**, Yogyakarta: Bappeda Propinsi DIY.
- Direktorat Pembangunan Desa Propinsi DIY 1996, **Laporan Pelaksanaan Program P2W di Propinsi DIY**, Yogyakarta, Bangdes Propinsi DIY.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, **UUD 1945, P-4, GBHN**, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1993, **Pedoman Pelaksanaan Mekanisme Pemantauan Program Peningkatan Peranan Wanita**, Jakarta: Kantor Men. UPW.
- Siti Sugiah Mugniesyah, M., 1995, **Konsep Jender dalam Program Pembangunan**, Makalah Pelatihan Studi Jender dan Pembangunan, di IPB, Bogor.

Sjamsiah Achmad, 1995, **Pemampuan Perempuan**, Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita IPB, Bogor.

United Nations, 1995, **Report of The Fourth World Conference on Women**, Beijing, Cina: United Nations.